

## ABSTRAK

Pengetahuan tentang karakteristik formal dan informal menjadi penting jika dikaitkan dengan kebijakan. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang saat ini sedang memberi perhatian lebih kepada sektor informal khususnya PKL. PKL masih menjadi problematika perkotaan dengan konsep dualistiknya. Perhatian pemerintah tersebut dirumuskan dalam suatu kebijakan berupa program penataan yaitu salah satunya penataan Simpanglima yang di dalamnya berjalan aktivitas PKL. Dalam penataannya, terdapat indikasi adanya upaya formalisasi PKL Simpanglima.

Fenomena tersebut dapat dikerucutkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana indikasi formalisasi aktivitas PKL di Simpanglima Semarang? Untuk menjawab permasalahan tersebut dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah menelaah indikasi formalisasi aktivitas PKL. Adapun sasaran yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi eksisting aktivitas PKL, mengidentifikasi profil PKL dan pengunjung, mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL dan persepsi pengunjung terhadap keberadaan PKL serta merumuskan indikasi formalisasi aktivitas PKL di Simpanglima Semarang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan alat analisis yaitu deskriptif kuantitatif, distribusi frekuensi serta metode *crosstab* (tabulasi silang). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data primer yaitu berupa kuesioner, wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder berupa dokumentasi dan instansional. Metode penarikan sampel untuk populasi PKL dan pengunjung dengan menggunakan *proportional stratified random sampling*.

Output dari penelitian ini adalah merumuskan indikasi formalisasi aktivitas PKL. Menurut profil PKL, bahwa usaha PKL dapat menjadi salah satu alternatif matapencaharian utama masyarakat. Pada analisis karakteristik aktivitas PKL diketahui telah terjadi pergeseran karakteristik PKL. Sedangkan profil pengunjung PKL bahwa pengunjung PKL berasal dari segala jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan latar belakang pendidikan. Rumusan akhir menunjukkan bahwa terindikasi adanya formalisasi aktivitas PKL yang telah menggeser paradigma karakteristik aktivitas PKL klasik.

Dengan mengacu pada output di atas, rekomendasi untuk pemerintah selaku pemangku kebijakan adalah lebih mempertimbangkan karakteristik siapa, apa, bagaimana obyek penataan yaitu baik dari segi PKL, pengunjung, sektor formal atau kegiatan utama yang berada di sekitarnya sehingga lebih terintegrasi dan saling menunjang antar satu sektor dengan sektor lainnya. Selain itu, perlu adanya penegasan dalam peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Kata kunci : formalisasi, PKL, karakteristik aktivitas.